UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN BANTUL
MOAMMAR QADHAFI, Dr.Supriyadi,S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia,* Mandar Maju, Bandung.

_____ , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,* Refika Aditama, Bandung.

Ansori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indoneisa,* Uii Press, Yogyakarta.

Arief, M.Isa, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda,* PT. Intermasa, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodelogis Ke Arah Penguasaan Modal Aplikasi,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta.

Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Koesnoen, Mr. R.A, 1961, *Politik Penjara Nasional,* Sumur, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, 1997, *Etika Hukum Profesi,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ ,2006, *Etika Profesi Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN BANTUL
MOAMMAR QADHAFI, Dr.Supriyadi,S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nawawi, Hadari, 1995, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah,* Erlangga, Jakarta.

Notodisoerjo, R. Sugondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia,* PT Raja Grafindo , Jakarta.

Saydam, Gauzali, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan,* Djambatan, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta.

S.P, Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi,* PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sujanto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

Sumardjono, Maria, S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tedjosaputra, Liliana, 1999, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum* Pidana, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Tobing G.H.S, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta.

Thoha, Miftah, 2005, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara,* PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN BANTUL
MOAMMAR QADHAFI, Dr.Supriyadi,S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG BERSTATUS SEBAGAI NARAPIDANA DI KABUPATEN BANTUL
MOAMMAR QADHAFI, Dr.Supriyadi,S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

C. Karya Ilmiah

Nurdiana Fitria, 2012, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris di Banjarmasin", *Tesis*. Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yuana Rizka Paramita, 2017, "Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Tugas dan Jabatan Notaris di Kabupaten Bantul, *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tri Meitasari Bakhtiar, 2013, "Pengawasan Majelis Pengawasan Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Indramayu", *Tesis*. Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.